BUNGA RAMPAI PENGKADERAN

MENYAMBUT GERAKAN SOSIAL BARU

PC. PMII KOTA SEMARANG

BUNGA RAMPAI PENGKADERAN

MENYAMBUT GERAKAN SOSIAL BARU

Di Susun Oleh:

Tim Penyusun Bunga Rampai Pengkaderan

Semarang, November 2017

Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Kota Semarang

Jl. Bugangan III, No. 326, Rt: 003 Rw: 001 Bugangan,
Semarang Timur - Kota Semarang

Daftar Isi

Bunga rampai ini kami persembahkan untuk para kader PMII Kota Semarang.

Kepada kalian, semoga apa yang ada di dalam buku ini bermanfaat.

STRATEGI GERAKAN PMII
DI TENGAH GERAKAN SOSIAL BARU

Melihat kondisi kesejarahan gerakan mahasiswa dan berbagai tren gerakan sosial baru, sudah seharusnya PMII menengok kembali paradigma pergerakannya.

Konflik sosial pada esensinya adalah hubungan yang interaksional. Konflik sosial mengandaikan adanya dua atau lebih orang atau kelompok dalam sebuah situasi saling mengajukan klaim dan bertarung antara satu sama lain, menggunakan isu dan persoalan-persoalan. Menurut Lewis Coser, konflik adalah perjuangan yang bertujuan mendapatkan tujuan-tujuan jangka pendek dan secara simultan menetralisir, menciderai atau mengeliminir pesaing-pesaingnya (1956: 8). Sementara aksi sosial konfliktual bisa didefinisikan sebagai usaha kolektif sekelompok orang untuk mendapatkan tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, nilai yang dianut secara kolektif, bahkan meski harus berhadapan dengan penentangan dan konflik.

Revolusi adalah aksi sosial konfliktual yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berasal dari rasa ketidakpuasan, penyangkalan dan perasaan terampas (terkoptasi) secara kolektif. Perasaan-perasaan tersebut menimpa seluruh masyarakat yang mengalami situasi yang sama dan tingkat kesadaran yang sama. Kesadaran inilah yang membuat mereka akhirnya memilih untuk terlibat dalam aksi bersama untuk mengidentifikasi siapa musuh mereka yang telah membuat hidup mereka semenderita itu. Makna penting yang paling mendasar dari revolusi terletak bukan pada penggunaan kekerasan untuk mengubah secara mendasar

organisasi sosial, namun dasar dari revolusi adalah kemampuannya untuk berdampak terhadap terciptanya sebuah pergeseran besar-besaran dalam relasi antar kelas (Musel 1948: 368).

Sementara Mao Zedong menuliskan, Revolusi bukanlah pesta santap malam, atau menulis esai, atau melukis, atau menyulam. Aku tidak bisa menjadi elegan, begitu santai dan lemah lembut, begitu berkepala dingin, baik dan sopan, bisa menahan diri, dan murah hati. Revolusi adalah pemberontakan, tindak kekerasan ketika satu kelas menggulingkan kelas lain.

Gerakan Sosial Baru

Begitulah revolusi dikatakan dan dipraktikkan di masa terdahulu. Sementara dari semua jenis aksi kolektif, penulis ingin menuliskan bahwa kita bisa mengambil berbagai bentuk aksi yang tidak terlembagakan namun terorganisir dan tanpa kekerasan seperti aksi duduk bersama memblokade, mogok makan, boikot, pemogokan atau aksi protes terhadap sesuatu dengan berteriak-teriak menyuarakan protes, kalau di Indonesia ada yang namanya "Kamisan". Para peletak teori sosial baru memotong takdir dengan mengatakan bahwa aksi kolektif seperti revolusi tidak akan bisa dilakukan di masa kontemporer ini melihat dan menimbang berbagai pra-syarat situasi sosialnya.

Suatu gerakan bisa dikatakan sebagai gerakan sosial bisa dilihat dari ciri-cirinya yang selalu: 1) adanya kesamaan ideologi pada semua partisipan yang terlibat; 2) strategi untuk mencapai tujuan; 3) struktur organisasi yang jelas sehingga memungkinkan untuk terjadi komunikasi yang terstruktur dengan jelas; 4) mobilisasi untuk melawan pihak musuh; 5) ada dampak kepada masyarakat akibat gerakan sosial tersebut. sementara yang baru dalam gerakan sosial adalah kenyataan di masa-masa kontemporer ini bahwa gerakan sosial tidak harus selalu menjadikan negara sebagai lawannya, perusahaan multi-nasionalah yang seringnya menjadi musuh bersama.

Perkembangan masyarakat dari masyarakat industri menuju masyarakat pos-industri membentuk tatanan masyarakat baru. Jarak negara dengan masyarakat sipil juga semakin jauh. Perkembangan

masyarakat ini juga menuju ke perkembangan dimana hak negara cenderung lebih banyak dan memasuki ranah privat dan ruang-ruang publik terbuka, misalnya UU ITE, Perpu Ormas dan UU Pornografi.

Memasuki tahun 1960-1970-an masyarakat Amerika dan Eropa menyaksikan munculnya gelombang gerakan bersekala luas di seputar isu humanis, kultural dan non-materialistik. Tujuan dari aksi-aksi semacam ini bersifat universal, tidak lagi dibatasi lokalitas atau regionalitas tertentu. Aksi gerakan sosial baru biasanya mengarah pada aksi anti rasisme, anti nuklir, lingkungan, feminisme, kebebasan sipil dan hal-hal yang dianggap secara teoritis tidak akan mampu membangkitkan gerakan yang berujung pada revolusi petani, revolusi secara total seperti 100 tahun silam tidak bisa diulangi. Gerakan sosial baru sebenarnya selalu membuat perlawanan-perlawanan sebagai identitas politik, meneguhkan apa yang diperjuangkan, siapa musuh dan kawan perjuangannya.

Ciri utama Gerakan Sosial Baru (GSB) sebenarnya bisa diidentifikasi. *Pertama,* GSB mengangkap perkembangan masyarakat pos-industri membuat negara dan pasar menjalin sebuah hubungan yang membuat mereka saling diuntungkan. Ekspansi pasar juga dianggap membuat negara semakin memasuki hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Seiring gempuran negara dan pasar itulah GSB membuat pertahanan diri. *Kedua*, teori kelas dalam GSB dianggap sudah kehilangan daya analisisya. Teori marxis dianggap tidak mumpuni untuk menjelaskan gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak sedang memperjuangkan kelas. Lihat di perjuangan Kendeng, gerakan itu melibatkan lintas kelas dan menyuarakan lingkungan (sesuatu yang universal). Isu yang diangkat bersifat universal dan biasanya memunculkan banyak kepala. Selain hilangnya musuh bersama, inilah yang penulis anggap sebagai salah satu faktor penyumbang kenapa gerakan mahasiswa dewasa ini terfragmentasi.

Ketiga, aktor gerakan GSB lebih banyak mengangkat tema perjuangan dari ranah masyarakat sipil, ketimbang masalah ekonomi dan negara (Jean Coen, 1985: 667). GSB melakukan kritik terhadap demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari. Gerakan ini juga lebih memperjuangkan partisipasi politik dan reprensentasi publik pada struktur yuridis (upaya

penghapusan kolom agama dan perjuangan penerimaan negara kepada warga penghayat). Maka tujuan GSB adalah tentang penataan relasi negara dengan masyrakat sipil, relasi masyarakat dengan perekonomian dan penciptaan ruang demokratis tentang kebebasan individu dan dalam setiap gerakannya mereka membatasi diri mereka secara jelas.

Strategi Gerakan PMII

Paska hilangnya negara otoriter sebagai musuh bersama dan model gerakan sosial baru yang bercirikan keragaman isu, maka fragmentasi dan polarisasi gerakan mahasiswa tidak bisa dihindari. Tetapi, pada esensi setiap gerakan di setiap zaman, harus kita ketahui bahwa perbaikan tatanan sosial masyarakat adalah tujuan akhirnya. Melihat kualitas dan kuantitas kader PMII, serta keragaman latar belakang intelektual kader, maka sudah seharusnya kita lontarkan pertanyaan serius pada model dan strategi gerakan yang diusung PMII. Seperti apakah strategi gerakan sosial PMII dalam memenuhi dan mewujudkan esensi gerakan mahasiswa yang bertujuan melakukan perbaikan pada tatanan sosial masyarakat itu?

Jawaban klasik mungkin akan menawarkan dua pilihan. *Pertama,* melalui gerakan parlementer dengan mendorong kader masuk menjadi bagian dari negara. Kedua, gerakan non parlementer dengan semangat Paradigma Kritis Transformatif-nya (PKT) yang sudah ramai dikaji ulang relevansinya di masa sekarang. Semua jalan atau strategi tentunya masing-masing punya resiko. Tetapi, apapun resiko dari strategi gerakan yang harus dipilih, baiknya PMII Semarang harus punya beberapa masalah utama yang menjadi sekala prioritas untuk diperjuangkan. Pondasi dari pemilihan masalah utama ini bisa saja diambilkan dari Nilai Dasar Pergerakannya.

Pertama, dalam ranah *hablun min Allah*, jadikan visi memerangi ideologi pendirian khilafah sebagai sekala prioritas. Jika target dari suatua permasalahan sudah ditetapkan, maka program-program turunannya bisa dijalankan sefleksibel mungkin. *Kedua, hablun min annas*, misal kita pilih pemberantasan korupsi sebagai permasalah utama yang ingin dijadikan

sekala prioritas perjuangan dan pendampingan. Karena pada esensisnya menurut kami sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan negara, selama masih ada korupsi, kesenjangan sosial masih akan semakin lebar. Penetapan permasalahan semacam ini tentu harus melihat kadar strategis suatu permasalahan terhadap daya gerak yang dimiliki PMII Semarang. Terakhir *hablun min al-alam*, meningkatnya agka konflik agraria, krisis lingkungan, maka PMII harus turut serta dalam gerakan yang sudah terbentuk jaringan advokasinya.

Sekala prioritas dalam strategi gerakan memungkinkan PMII terhindar dari fragmentasi dan polarisasi gerakan. Sekian banyak isu yang dimunculkan dalam wacana GSB, tidak seharusnya dijadikan agenda utama PMII. Pemilihan mana isu yang seharusnya disikapi secara serius, dan mana yang hanya terlibat sebagai partisipan harus ditentukan pada SDM gerakan dan relasi jaringan PMII untuk secara potensial mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dipilih. Misal, kapan harus melakukan aksi turun ke jalan, melakukan blokade atau aksi protes, kapan audiensi dengan lembaga baik negara atau swasta (perusahaan) dan kapan hanya terlibat sebagai partisipan. Jika manajemen gerakan semacam ini tidak dilakukan, PMII akan kehabisan stamina sebelum tujuan awal dan paling kecil yang ingin ia capai mampu terwujud.

Kembali ke pertanyaan awal, apa strategi yang harus digunakan? Bagi kami, PKT harus didialogkan dengan kelonggaran akses dan besarnya peluang PMII menjadi bagian negara. Tetapi, bagi kami, mengukur seberapa relevan PKT dijadikan kacamata pembesar untuk menganalisis setiap permasalahan sosial, atau memodifikasinya dengan memasukan nilai-nilai baru yang melengkapinya, hanya bisa dilakukan jika proses penggarapan tiga permasalahan utama yang ditelurkan dari turunan NDP tadi dikerjakan dengan batas ruang dan waktu yang jelas. Ruang itu maksudnya permasalhan lokalitas yang diutamakan, jangan sampai bicara Rohingya tetapi tidak tahu masalah di Kebon Harjo. Waktu sebagai pembatas, artinya PMII punya manajemen aksi dengan strategi keberlanjutan yang terukur, misal untuk kasus yang membutuhkan proses penyelesaian tidak cukup dua atau tiga tahun, Pengurus Cabang wajib melibatkan Pengurus Komisariat.

Mendekati paripurna, kami ingin mewariskan dan berpesan kepada pengurus selanjutnya. Kita hendaknya didesak situasi zaman untuk melakukan kontekstualisasi PKT yang harus disepakati sebagai paradigma gerakan. Melihat kondisi kesejarahan gerakan mahasiswa dan berbagai tren gerakan sosial baru, sudah seharusnya PMII menengok kembali paradigma pergerakannya, itupun jika masih percaya jika sesuatu yang besar diawali dari gagasan yang besar dan benar. Tanpa mencoba serius mengerjakan sekala prioritas tadi, kita tidak akan pernah tahu seberapa usang PKT, kita tidak akan bisa mencapai tujuan meskipun nafas hanya tersisa satu tarikan.

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan Pengkaderan PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

SISTEM PENGKADERAN **BERBASIS MENTOR**

Sudah seharusnya PMII memberikan seperangkat kemampuan teknis yang bisa dijadikan kader sebagai modal hidup, tanpa mengkhianati ideologi PMII.

Pulau-pulau yang ada di bumi ini memang terpisah-pisah, tetapi relasi ekonomi-sosial-politiknya kian menguat, menyatu dan semakin tidak terpisahkan. Perkembangan teknologi membawa hubungan tersebut pada suatu titik leleh (*melting point*) yang membuat masing-masing peradaban tidak bisa mencegah peradaban lain mencampurinya. Seperti bahasa Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang mempunyai ragam bahasa daerah, maka interaksi antar peradaban - antar bangsa juga memerlukan hal yang serupa bahasa Indonesia tadi dalam konteks ekosospol. Maka setelah hak paten, lahirlah sertifikasi. Sertifikasi dalam corak "positivistik" adalah representasi tolak ukur sesuatu yang biasanya bersifat kualitatif, kemampuan mengajar, kemampuan mengoperasikan suatu mesin, pemahaman atas suatu sistem pengetahuan, tolak ukur kelayakan suatu barang diperjual-belikan, dst.

Pada tahun 1949 ada simposium di Prancis tentang teknokrasi[1], dimana teknologi diwacanakan menjadi tiang penyelenggara hajat hidup rakyat. Tetapi, perang gagasan belum selesai, Herbert Marcuse mengkritik kebudayaan teknokrasi yang sudah terlanjur terbentuk melalui bukunya, *One Dimention Man* (1964). Menurutnya masyarakat Amerika, Eropa dan Uni Soviet telah dikuasai prinsip irasionalitas teknologis, dimana penge-

1 suatu gerakan sosial yang percaya bahwa kehidupan akan lebih baik jika masyarakat diatur secara ilmiah oleh para insinyur yang mempunyai keahlian khusus dan pengetahuan teknis, dipopulerkan oleh Howard Scott, sosiolog Amerika yang bersinar paska *Great Depression*).

lolaan terhadap alam dan manusia semestinya tidak dilakukan secara teknokratis. Marcuse mengkritik bagaimana masyarakat sudah hidup terjebak pada suatu sistem teknologis-totaliter pada peradaban industri maju (Dawam Raharjo: 2012). Penulis ingin meletakkan pencarian espitimologi ini untuk mengantarkan pembaca secara obyektif tentang pengkaderan berbasis mentor.

Kembali kepada bahasa pemersatu dunia tadi, maka bentuk hak paten dan sertifikasi biasanya mengikat suatu daerah dengan batasan wilayah yang jelas, misal Standar Nasional Indonesia, artinya tolak ukur kelaikan barang atau sistem pelayanan jasa yang dianggap laik dipakai di Indonesia. Label halal pada makanan, wilayahnya jelas, bagi konsumen muslim untuk mengetahui suatu produk makanan atau obat yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai hukum islam atau tidak. Sertfikasi dokter, guru dan beberapa deret pekerjaan profesional lainnya ada sertifikasinya, bahkan tukang sound sistem. Konon Cold Play gagal manggung ke Indonesia lantaran promotor gagal menyediakan syarat yang diajukan Cold Play, yaitu harus ada tukang sound sistem bersertifikat keahlian khusus. Semua diseragamkan demi menghindari silang komunikasi bahasa global akibat masing-masing keragaman bahasa setiap bangsa. Ya, jelas kita tahu bahwa suatu peradaban (seperangkat hasil sistem prilaku ataupun berpikir) sebenarnya tidak bisa diukur secara pasti dengan selembar kertas sertifikasi. Tapi mau bagaimana lagi, begitulah dunia bergerak, kemenangan positivisme dengan segala kedigdayaannya.

Sebagian besar kader PMII tentu sudah tahu jika kuliah tidak melulu harus dikorelasikan dengan mencari kerja, tetapi banyaknya angka pengangguran di kalangan sarjana bukanlah hal yang membuat PMII harus menutup mata. Menurut BPS jumlah sarjana yang menjadi pengangguran terbuka (usia produktif pekerja), tercatat sebanyak 567.235 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 606.939 pada 2017 (data per februari 2017). Padahal rata-rata jumlah sarjana setiap tahun sekitar 250.000. Artinya, jangan sampai PMII membuat fakta sosial tersebut menjadi semakin parah dengan menjadikan para alumninya menjadi penyumbang-penambah angka pengangguran tadi.

Selain mengajari berbagai sistem pengetahuan yang meliputi pengetahuan agama yang mencegah seorang kader menjadi teroris-ekstremis dan setia pada Pancasila sesuai haluan Aswaja, pengetahuan tentang kenegaraan sehingga mampu mendesak dan atau mewujudkan kehadiran negara dalam berbagai setiap permasalahan sosial yang dihadapi rakyatnya, sudah seharusnya PMII juga memberikan seperangkat kemampuan teknis yang bisa dijadikan kader sebagai modal mencari kerja, tentunya tanpa mengkhianati semangat beragama dan bernegara yang penulis sampaikan sebelumnya. Disinilah kita dibawa masuk pada sitem pengkaderan berbasis mentor. Sistem ini bagi penulis adalah tentang bagaimana membuat asah-asih-asuh menjadi sepraktis mungkin.

Penulis akan menempatkan asah-asih-asuh dalam definisi sederhana menjadi mendidik-mencintai-membina. Asah adalah kemampuan pengkaderan yang memberikan seperangkat ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif, seperti mengajarkan bagaimana mempraktikan Aswaja dalam konteks bernegara sampai praktik sehari-hari. Tataran praktisnya tentu dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, ceramah atau sekolah pemikiran. Kemudian asih, mencintai. Pengkaderan menuntut kita untuk rela merelakan kenyamanan pribadi demi kemajuan kader, ketulusan berkorban asal kadernya mampu menjadi lebih baik dibanding dirinya. Secara teknis, pengkaderan tidak segan ikut *patungan* mengirimkan kadernya ke berbagai kegiatan atau pelatihan (syukur-syukur membuatkannya sendiri) agar kadernya mengalamai peningkatan kualitas. Memang *patungan* tak melulu soal uang, bisa juga berupa pengorbanan waktu mengerjakan tugas pribadi yang diperuntukan untuk mendampingi proses belajar kader.

Jika sudah memberi pengetahuan dan mencintai kader, maka kita harus membinanya. Kita harus tegas untuk mengingatkan kader jika ia salah, membangkitkan semangat perjuangannya saat mulai lesu dan meluruskan orientasi pergerakannya agar tidak menjadi sekedar kader pragmatis yang oportunis. Secara konseptual landasan asah-asih-asuh tersebut kemudian menjadi sistem mentor dimana satu pengurus dibebani mengembangkan potensi kader dengan ketentuan jumlah yang proporsional sesuai kebutuhan. Bisa satu pengkader (mentor) diamanahi

5 kader misalnya. Salah satu tujuan sistem ini adalah menyiapkan kader yang mempunyai kemampuan profesional di bidang tertentu. Dimana hal ini mau tidak mau menyeret PMII pada fakta bahwa PMII hanya sebatas adaptif terhadap semangat zaman yang sedang berkembanng.

Sistem ini memang sudah lama, sebelum penulis menjadi pengurus, penulis sudah curiga bahwa sistem ini memang dikonsepkan agar alumni PMII tidak nganggur. Maka pengkaderan ini sangat kental usahanya untuk mendorong seorang kader menguasai secara profesional di bidang tertentu, pada umumnya PMII Semarang sering merumuskannya pada tiga bidang utama yaitu, politik, akademik dan wirausaha.

Praktik teknis sistem tersebut dalam pengkaderan tadi bisa diarahkan sesuai kebutuhan, misalkan berdasarkan jurusan ataupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Tuntutan sertifikasi bisa ditanggulangi jika pengurus mengaplikasikan sistem ini. Pengacara yang handal, profesional, bisa dilahirkan dengan sistem mentor berdasarkan jurusan (mentor dan kader jurusan kuliahnya sama). Jika sistem pengkaderan ini berhasil, maka jangankan pengacara profesional, PMII juga sekaligus akan memproduksi pengacara yang akan membela kaum yang dilemahkan (*mustad'afin*). Karena sesuai asas asah dia akan diberi sistem pengetahuan yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut (diajarkan Teologi Pembebasan misalnya). Begitu juga dengan profesi lainnya.

Penulis hanya mau mengingatkan, seperti kritik Marcuse, sistem ini akan menjebak kita terkontrol tanpa ampun oleh kehidupan yang teknokratis-totaliter. Implikasinya pada sistem pengkaderan ini adalah melemahnya daya dobrak PMII di ranah sosial, melemah dan tumpulnya analisis sosial karena bobot pengetahuan teknis yang dibebankan kepada kader. Inipun jika kita masih percaya bahwa tidak akan ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner. Tapi jika ber-PMII hanya untuk selamat dan tidak menjadi 1 dari 606.939 pengangguran yang sudah terdata, maka sistem ini bebas kritik.

Tetapi karena kita tahu dan sadar bahwa kata Itachi Uchiha setiap *jutsu* mempunyai kelemahan, maka alangkah baiknya sistem ini kita sempur-

nakan semaksimal mungkin. *Pertama*, mentor ini harus berlapis. Setiap pengurus Rayon yang biasanya diisi mahasiswa semester 3 atau 5, tentu punya rasa kehausan akan pengembangan diri, kehebatan mereka bisa terhenti jika dipakasa mengkader (melakukan mentor) kepada adik angkatan tanpa menerima hal yang serupa. Maka pengurus rayon perlu mendapat mentor yang membimbingnya dari tingkat komisariat atau cabang, begitu seterusnya. Cara pertama dalam memaksimalkan sistem ini secara otomatis akan memastikan terjaganya keluarga besar PMII secara kolektif dan meningkatnya rasa kepemilikan bersama para alumninya.

Kedua, proses peningkatan kualitas keprofesionalitasan baik yang didesain melalui pengkaderan berbasis UKM atau melalui berbagai pelatihan, haruslah dipandang secara integratif, tidak boleh parsial. Misalnya, kita tidak boleh menjauhkan pendidikan politik kepada kader yang menempuh pendidikan kaderisasi di bidang wirausaha. Sebaliknya, kader yang memilih jalur politik jangan sampai dibiarkan tanpa modal pengetahuan penguatan ekonomi, apalagi di jalur akademik. Berdasarkan pijakan espitimologi inilah penulis mengusulkan untuk setiap kader dalam Pelatihan Kader Lanjut (PKL) menyentuh tiga ranah ini sekaligus, tidak parsial seperti PKL periode sebelumnya.

Terakhir, kita harus sadar bahwa kondisi sosial selalu berubah begitu cepat. Pada konteks visioner, pengkaderan berbasis mentor ini bisa dijadikan strategi juang diaspora PMII untuk memenuhi semua lubang posisi yang sekarang diisi tokoh-tokoh neo liberal, tokoh sekuler yang selalu memandang sebelah mata agama, tokoh-tokoh yang mengaku demokrat tapi diktaktor. Bagaimana ini bisa dikerjakan? Tanyakan orientasi ber-PMII kita, pertanyakan lagi filosofi pengkaderan kita, lalu sentuhkan kader pada sastra dan tanamkan imajinasi yang baik-baik serta ajari mereka tentang optimisme.

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan Pengkaderan PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

NILAI TEOLOGIS **AKTIVIS PMII**

Menjadi akademis atau aktivis bukan untuk masalah kebanggan, tetapi panggilan kodrat kehidupan yang menuntut manusia terus mencapai titik potensial kualitas tertinggi yang bisa ia capai.

Dalam QS. Ali Imran ayat 1-2, Quraish Shihab menafsirkan bahwa: Allah sebagai Maha-Pencipta disifati dengan dua sifat yang sempurna, yaitu Maha-Hidup dan Maha-*Qayyum*. Banyak ulama yang menandai hidup makhluk dengan gerak, rasa dan tahu. Yang tidak bergerak, atau tidak merasa, dan tidak juga tahu—minimal dirinya sendiri—maka dia adalah sesuatu yang mati. Hidup itu bertingkat-tingkat. Kehidupan binatang lebih berkualitas daripada tumbuhan karena keleluasaan bergeraknya. Kehidupan manusia lebih berkualitas daripada hewan karena rasa dan pengetahuanya. Orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang penting lagi mulia, hidupnya lebih berkualitas daripada yang hanya mengetahui sesuatu yang remeh temeh.

Sementara kata *qayyum* terambil dai kata *qawama* yang mengandung makna terlaksananya sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan. *Allah al-Qayyum* adalah Dia yang mengatur segala sesuatu yang merupakan kebutuhan makhluk sehingga terlaksana secara sempurna dan berkesinambungan. Sedangkan diri-Nya sendiri tidak memerlukan sesuatu untuk wujud dan kesinambungan wujud-Nya. Dirangkainya sifat Maha-Hidup dan sifat *Qayyum*, memberi isyarat bahwa hidup yang sebenarnya itu bukan hidup sendiri atau bersifat egosentris, tetapi kemampuan memberi hidup dan sarana kehidupan kepada pihak lain.

Jadi peribahasa *'rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau'* sering disalah-kontekstualisasikan. Peribahasa itu sering dikontekskan bahwa kita tidak boleh iri dengan milik orang lain, prestasi orang lain atau pun kua-litas yang orang lain miliki. Di sisi lain mungkin benar, agar menghindarkan kita kepada rasa iri dan dengki. Tetapi di sisi lain menyeruak lebar jurang kemudaratan. Tafsiran peribahasa itu membuka peluang agar kita tidak iri kepada orang yang mempunyai prestasi yang lebih baik.

Karena pada dasarnya manusia tidak suka diperbandingkan, ditambah sering membandingkan yang tidak seharusnya berada pada posisi sejajar untuk diperbandingkan, akhirnya manusia bisa membedakan hirarki kualitas yang secara fitrahnya memang ada. Padahal dari tafsir *Al-Mishbah* di atas, kita tahu bahwa kehidupan ini mempunyai sesuatu yang hirarkis. Terutama dalam kualitas gerak, rasa dan pengetahuan. Maka saat rumput tetangga lebih hijau (prestasi dan kualitas yang ia miliki), sudah seharusnya kita iri dan berusaha membuat rumput kita sehijau milik tetangga.

Kontekstualisasinya di PMII

Sebagai mahasiswa, jalan hidup yang ditempuh pasti berbeda-beda. Bisa saja fokus pada perkuliahan dengan angka sebagai indikator tunggal eksistensi diri—atau dalam istilah populernya disebut mahasiswa akademis. Kemudian ada kelompok lain yang giat berorganisasi dan berusaha meningkatkan dan memperluas pergaulan (gerak) dan pengetahuan untuk mengembangkan rasa (melalui pengalaman)—atau dalam istilah populernya disebut aktivis. Dua tipe ini bagi penulis tentu bukan sesuatu yang kompatibel, layak untuk diperbandingkan.

Sekali lagi, hidup yang sebenarnya itu bukan hidup sendiri atau bersifat egosentris, tetapi kemampuan memberi hidup dan sarana kehidupan kepada pihak lain. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainya. Islam menyimpan ajaran yang sangat menjauhkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya semata. Maka berorganisasi adalah salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hirarkis kehidupan melalui tiga ciri utamanya; gerak, rasa dan pengetahuan. Ber-

organisasi artinya secara sadar dan bertanggungjawab ingin menjadi pribadi dengan kualitas yang kian baik dan tinggi.

Sibuk mengerjakan tugas demi nilai kuliah dalam konteks sosial tidak ada bedanya dengan tidur. Keduanya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Jika tidak dilakukan, hanya diri sendiri yang rugi, pun sebaliknya, jika dilakukan hanya diri sendiri yang untung. Meski begitu, dalam konteks pribadi mengerjakan tugas tetap lebih baik daripada tidur. Tetapi dalam konteks sosial, keduanya tidak mendapat perbedaan kualitas yang signifikan.

Maka bergabung dengan PMII harusnya membantu kita menuju tangga hirarkis kualitas kehidupan. Dengan PMII kita bisa lebih leluasa bergerak, bisa menempa pengetahuan yang lebih mendalam dan tidak sekadar pengetahuan yang remeh. Maka gerak dan pengetahuan tersebut akan menghasilkan kedalaman perasaan akan setiap titik kehidupan kita. bergabung dengan PMII berarti siap meninggalkan kenyamanan pribadi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang tidak egosentris. Terakhir, pertanyaan yang penuh rasa penasaran harus dikemukakan, "Apa menariknya jika hidup hanya selalu untuk diri sendiri?"

Maka suatu saat jika mendengar ada yang membanding-bandingkan, mana yang lebih baik antara akademis dan aktivis? Kita harus tahu di mana selaiknya memberatkan timbangan penilaian tersebut dalam konteks sosial. Meski begitu, menjadi akademis atau aktivis bukan untuk masalah kebanggan, tetapi panggilan kodrat kehidupan yang menuntut manusia terus mencapai titik potensial kualitas tertinggi yang bisa ia capai. Terakhir, untuk refleksi seberapa baik kualitas kita, tentu ukuran seluas apa gerak, pengetahuan dan rasa adalah alat ukur sederhananya.

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan Pengkaderan PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

MEMBACA RELASI **SENIOR-JUNIOR DALAM PMII**

Bukan berarti ketika berbeda di luarnya, berarti hilang ketundukannya. Justru ketundukan yang lebih dalam, yang dinilai Gus Dur sebagai ketundukan yang melalui penghayatan dan bersifat pengembangan, dan memiliki nilai sendiri yang mendasar.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari rahim NU. Walaupun pada perjalanannya melakukan pemisahan secara struktural dari Nahdlatul Ullama' (NU), namun tradisi dan budaya NU tentu masih melekat di PMII, mungkin tak semuanya.

Salah satu tradisi yang kadang diperdebatkan di kalangan PMII adalah tentang ketundukan. Bahwa dalam kultur NU, ketundukan kepada kiai adalah suatu yang tak bisa ditawar. Ketundukan, bahkan, menjadi salah satu pembeda NU dari yang lain.

Kader-kader PMII memiliki pandangan berbeda-beda tentang ketundukan. Kadang dirasa oleh sebagian, ketundukan merupakan penghambat progresivitas gerakan. Berbagai sikap pun muncul. Sebagian memilih tunduk dan patuh, sesuai fatwa seniornya, tanpa melakukan penolakan. Sebagian lagi ada yang berontak, bahkan anti senior, karena meyakini pandangannya lebih progresif, atau hanya sekedar ingin dianggap progresif, yang disimbolkan berani berbeda dengan senior.

Penulis dalam tulisan ini, mencoba membaca bagaimana ketundukan dimaknai, dalam relasi senior-junior dalam PMII.

Membaca ketundukan dalam kaitan relasi senior-junior dalam PMII ada baiknya dimulai dengan membaca makna ketundukan antara kiai dan santri dalam NU.

Gus Dur—di salah satu catatannya yang terkumpul dalam buku Kiai Nyentrik Pembela Pemerintah—dengan sosok Kiai Adlan, mengungkapkan adanya ketundukan luar, dan ketundukan yang lebih dalam. Bukan berarti ketika berbeda di luarnya, berarti hilang ketundukannya. Justru ketundukan yang lebih dalam, yang dinilai Gus Dur sebagai ketundukan yang melalui penghayatan dan bersifat pengembangan, dan memiliki nilai sendiri yang mendasar.

Kiai Adlan adalah murid setia yang mencintai gurunya, KH. Hasyim Asy'ari. Kata Gus Dur, kecintaan kepada gurunya itu melandasi hidupnya, bahkan setelah gurunya wafat. Sewaktu Mbah Hasyim, (panggilan KH. Hasyim Asy'ari) masih hidup, Kiai Adlan dilarang oleh guru tercinta mengikuti tarekat Kiai Romli Rejoso. Setelah Mbah Hasyim wafat, bukan hanya mengikuti, bahkan Kiai Adlan menjadi salah satu *mursid* tarekat (guru tarekat).

Menurut cacatan Gus Dur, sikap Kiai Adlan di atas, secara sepintas tidak bisa dinilai sebagai sikap pembalikan. Harus dipahami rasionalitas Kiai Adlan dalam bersikap. Apa yang dilakukan Kiai Adlan adalah bentuk dari pada ketaatan atas asas dalam berpikir.

Jalan pikiran Kiai Adlan, dalam pembacaan Gus Dur, bertumpu pada pembacaan konteks. Yang ditolak Mbah Hasyim bukanlah tarekat itu sendiri, tapi ekses-eksesnya. Waktu Mbah Hasyim menentang ekses-ekses tarekat, dengan era Kiai Adlan sudah berbeda persoalannya. Orang-orang era Kiai Adlan tidak bergairah menjalankan agama di luar tarekat. "Apakah kita biarkan mereka tidak sembahyang, hanya karena takut ekses-ekses tarekat itu sendiri? Mana yang lebih perlu, mengajak orang-orang sembahyang, atau meributkan soal ekses-ekses tarekat?" tulis Gus Dur dalam catatan tentang Kiai Adlan.

Menurut Gus Dur, ketundukan Kiai Adlan kepada gurunya itu tidak hanya bersifat literer, tapi justru ketundukan yang bersifat pengembangan dalam kasus yang berbeda. Gus Dur, dengan sosok Kiai Adlan mengkritik betapa sedikit orang yang mampu mempraktikkan ketundukan yang lebih dalam dengan penghayatan dan pengembangan. Banyak orang yang secara lahir tunduk, namun melakukan penentangan di dalam.

Dari catatan Gus Dur di atas, bukan berarti penulis ingin menyamakan hubungan kiai-santri dengan hubungan senior-junior di PMII. Tapi penulis ingin mengetengahkan makna ketundukan, yang lebih luas.

Bagi penulis, sebagai organisasi yang lahir dari rahim NU, tidaklah etis jika "ketundukan" kepada yang lebih tua ditanggalkan dengan dalih mengekang progresivitas gerakan. Namun juga akan aneh, sebagai organisasi pergerakan jika selalu tunduk secara normatif. Apalagi dalam ranah PMII, kadang ada beberapa pandangan senior dalam menyikapi sebuah fenomena, yang tak relevan dengan organisasi berbasis gerakan, seperti PMII.

Bagi kader PMII, perlu dipahami, kadang kala perbedaan pandangan junior dalam beberapa hal dengan senior, bukan berarti junior tersebut kehilangan ketundukannya, justru ia sangat tunduk dengan ajaran seniornya, yang menekankan pentingnya berpikir kritis, dan merupakan kepatuhan terhadap *manhaj* dan nilai dasar pergerakan organisasi, yang memungkinkan perbedaan interpretasi antar generasi.

Apa yang penulis sampaikan, mungkin *nyambung* dengan tulisan sahabat sekaligus rival penulis, yang menulis tentang sistem pengaderan berbasis mentor. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan kelemahan sistem mentor, yang bisa jadi membawa kaderisasi di PMII terjebak kehidupan yang teknokratik-totaliter. Namun ia tetap memilih sistem mentor dengan beberapa tawaran perbaikan.

Ada kekhawatiran lain dari penulis, yang mungkin belum diingatkan oleh sahabat penulis itu. Sistem mentor juga berpotensi membuat kader tunduk secara tekstual kepada mentornya, tanpa berani melakukan interpretasi, atau memaknai ketundukan yang lebih dalam seperti yang dilakukan Kiai Adlan. Tentu ini adalah problem yang cukup serius.

Penulis menawarkan sistem mentor juga mengadopsi sistem kaderisasi di pesantren, yang kata Gus Dur, Kiai diibaratkan sebagai Pandawa yang membantu Kurawa, yakni santri bertransformasi menjadi Pendawa, yang nantinya bisa membantu Kurawa-kurawa yang lain, di tempat dan waktu yang lain pula. Adakalanya mentor di sini bersikap "otoriter", yang

harus dilaksanakan oleh kader, namun, ada saatnya pula mentor membebaskan kader melakukan pengembangan dan pengambilan sikap yang benar-benar mandiri, yang tentu masih berlandaskan *manhaj* dan nilai pergerakan PMII. Jangan sampai sistem mentor bergeser kepada sistem penjajahan. Bukan membantu kader bertransformasi, namun mencetak kader sesuai ambisinya, yang kadang bersifat pribadi, dan menempatkan kader sebagai obyek belaka.

Kenapa penulis memaknai sistem mentor sebagai sistem yang membantu kader bertransformasi? Di era yang penuh keajaiban teknologi seperti sekarang, ada potensi-potensi yang hanya dimiliki kader, yang kadang tak dimiliki dan tak dipahami mentor, yang memiliki keterbatasan tempat dan waktu. Begitulah pendapat penulis. Anda setuju atau tidak, yang terpenting kita tetap bersahabat.

Penulis: ***Zaimuddin Ahya***

(Departemen Pers dan Teknologi Informasi PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

PESAN DEPARTEMEN PENGKADERAN: **PENUHI PANGGILAN KEJUJURANMU!**

Kejujuran adalah salah satu dari tiga entitas yang sering dikenal sebagai "Tri Komitmen" PMII. Sebuah janji yang dibangun dari keteguhan hati untuk membangun gerakan baik individu ataupun secara kolektif.

Jika kau tidak pernah mencuri, jauh dari tindakan korupsi dan perkataanmu selalu jujur, bolehlah kau mendaku sebagai pribadi yang jujur. Jika kau rela menderita dengan tidak memanfaatkan uang organisasi demi kepentingan pribadimu, atau sekurang-kurangnya tidak menggunakan kesempatan berorganisasimu hanya demi memperkaya dirimu sendiri, bolehlah kau berbangga karena menjadi pribadi yang jujur, meski yang demikian itu memanglah berat. Jika ada pemimpin yang secara pasti Anda ketahui kepribadiannya seperti itu, kau juga bisa melabelinya sebagai pemimpin yang jujur. Jika ada beberapa orang yang memenuhi kriteria seperti itu, apalagi seorang pemimpin, maka tenanglah hati kita saat mendiskusikan tema-tema keadilan dan pemberantasan korupsi.

Lantas apakah cukup jika kita sebatas jujur? Jawabannya bisa "iya" bisa juga "tidak". Dijawab "iya", karena memang negara kita terjangkit penyakit bernama korupsi yang disebabkan virus keserakahan yang sudah begitu akut. Menurut *Transparency International Indonesia* (TII) Indeks Persepsi Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara yang diawasi. Indonesia mendulang angka 37 dari nilai maksimal 100, Indonesia berada di bawah Malaysia (49), Brunei (58) dan Singapura (85). Dalam seting sosial seperti ini tentu menjadi jujur tidak sekadar cukup, tetapi penting dan mendesak.

Tetapi ada satu hal yang jarang kita sadari (Anda bisa protes dalam penggunaan kata "kita" jika Anda tidak nyaman) tentang fenomena kejujuran. Kita jarang mengingat tentang "panggilan kejujuran", yaitu sebuah panggilan kodrati bahwa kita harus berperilaku jujur dan mewujudkan ke-

jujuran dimanapun kita berada dan dalam posisi apapun (QS. At-Taubah: 119, QS. An-Nahl: 105, QS. Al-Ahzab: 70, dll). Jika kita sudah jujur tetapi kita tidak menghentikan atau mencegah orang-orang yang di sekitar kita untuk tidak berbuat jujur, maka kita belum memenuhi panggilan kejujuran. Jika kita jujur tetapi pura-pura tidak tahu terhadap orang-orang yang berperilaku tidak jujur di depan mata kita, maka kita mengabaikan panggilan kejujuran.

Masyarakat yang akut korupsi bisa meningkatkan pemberantasan korupsinya dengan memulai penggeseran orientasi perilakunya. Jika slogan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) “berani jujur itu hebat”, bagi penulis hal itu adalah solusi atomik. Berani jujur memang hebat, tetapi memenuhi panggilan kejujuran jauh lebih hebat lagi. Orang yang mendaku jujur tetapi mengabaikan panggilan kejujuran adalah orang munafik, orang yang ingin masuk surga tanpa berkeringat. Jika Anda seorang pemimpin, pastikan anggota Anda untuk tidak menggunakan sumber daya lembaga Anda untuk kepentingan pribadi mereka, dengan begitu, artinya Anda menjadi pemimpin yang berkomitmen ingin masuk surga dengan jerih keringat Anda sendiri.

Sementara panggilan kejujuran ini sebenarnya bukanlah barang asing untuk kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Karena kejujuran adalah salah satu dari tiga entitas yang sering dikenal sebagai “Tri Komitmen” PMII. Sebuah janji yang dibangun dari keteguhan hati untuk membangun gerakan baik individu ataupun secara kolektif keorganisasian untuk mewujudkan perubahan sosial. Kejujuran, Keadilan dan Kebenaran adalah tiga hal yang saling bertaut, tiga dalam satu (integritas karakter PMII). Jadi, jika Anda adalah kader PMII, terlebih sebagai pemimpin di berbagai tingkatan, lakukanlah sumbangsih pembangunan nasional dengan melakukan perubahan sosial di tubuh PMII dengan memenuhi “panggilan kejujuran”. Jadi, jujur saja bukankah tidak cukup?

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan
Pengkaderan PMII Kota Semarang
2016-2017)

KRITIK NALAR
MAHASISWA "KEKINIAN"

Menjadi akademis atau aktivis bukan untuk masalah kebanggan, tetapi panggilan takdir historis kehidupan yang menuntut mahasiswa terus mencapai titik potensial kualitas tertinggi yang bisa ia capai.

Dalam QS. Ali-Imran: 1-2, Quraish Shihab menerangkan bahwa; Allah sebagai Maha-Pencipta disifati dengan dua sifat yang sempurna, yaitu Maha-Hidup dan Maha-*Qayyum*. Banyak ulama yang menandai hidupnya makhluk dengan gerak, rasa dan tahu. Yang tidak bergerak, atau tidak merasa, dan juga tidak tahu -minimal dirinya sendiri- maka dia adalah sesuatu yang mati. Hidup itu bertingkat-tingkat. Kehidupan binatang lebih berkualitas daripada tumbuhan karena keleluasaan bergeraknya. Kehidupan manusia lebih berkualitas daripada hewan karena rasa dan pengetahuanya. Orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang penting lagi mulia, hidupnya lebih berkualitas daripada yang hanya mengetahui sesuatu yang remeh temeh.

Sementara kata *qayyum* terambil dari kata *qawama* yang mengandung makna terlaksananya sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan. Allah Maha-*Qayyum* adalah Dia yang mengatur segala sesuatu yang merupakan kebutuhan makhluk sehingga terlaksana secara sempurna dan berkesinambungan, sedangkan diri-Nya sendiri tidak memerlukan sesuatu untuk wujud dan kesinambungan wujud-Nya. Dirangkainya sifat Maha-Hidup dan sifat Maha-*Qayyum*, memberi isyarat bahwa hidup yang sebenarnya itu bukan hidup sendiri atau bersifat egosentris, tetapi kemampuan memberi hidup dan sarana kehidupan kepada pihak lain.

Tafsir Peribahasa Rumput Tetangga

Peribahasa rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau sering disalah-kontekstualisasikan. Peribahasa itu sering dikontekskan bahwa kita tidak boleh iri dengan milik orang lain, prestasi orang lain ataupun kualitas yang orang lain miliki. Di satu sisi mungkin benar, agar menghindarkan kita kepada rasa iri dan dengki. Tetapi di sisi lain menyeruak lebar jurang kemudaratan yang tercipta. Tafsiran peribahasa di atas membuka peluang penafsiran agar kita tidak iri kepada orang yang mempunyai prestasi yang lebih baik. Misalkan suatu hari penullis ditanya oleh seseorang, "*Sith, kelihatannya enak ya kalau menjadi aktivis? Banyak kegiatan, bisa menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Beda dengan kita, hanya pergi ke kampus untuk kuliah terus pulang lagi kos.*" Kemudian penulis menjawab, "*Ah sudahlah, rumput tetanga memang lebih hijau.*"

Pada analogi pertanyaan tersebut kita harus sadar bahwa pada dasarnya manusia memang tidak suka diperbandingkan. Selain itu tidak jarang kita memperbandingkan sesuatu yang tidak berada pada posisi sejajar untuk diperbandingkan. Kecenderungan-kecenderungan semacam ini akhirnya berpeluang menghalangi kita untuk mampu membedakan hirarki kualitas yang jika dilihat dari potensi dan etos belajar manusia memang ada. Padahal dari tafsir *Al-Mishbah* di atas kita tahu bahwa kehidupan ini mempunyai sesuatu yang hirarkis. Terutama dalam kualitas gerak, rasa dan pengetahuan. Maka saat rumput tetangga lebih hijau (prestasi dan kualitas yang ia miliki), bagi penulis sudah seharusnya kita iri dan berusaha membuat rumput kita sehijau milik tetangga.

Sebagai mahasiswa, jalan hidup yang ditempuh pasti berbeda-beda. Bisa saja mereka fokus pada perkuliahan dengan angka IPK tinggi sebagai indikator tunggal eksistensi diri -atau dalam istilah populernya disebut mahasiswa akademis. Kemudian ada kelompok lain yang giat berorganisasi dan terus berusaha meningkatkan dan memperluas pergaulan (gerak) dan pengetahuan untuk mengembangkan rasa (melalui pengalaman-atau dalam istilah populernya disebut aktivis. Dua tipe ini bagi penulis tentu bukan sesuatu yang kompatibel -layak untuk diperbandingkan. Jika ingin membandingkan aktivis haruslah dengan sesama aktivis, sementara

seorang akademis juga harus diperbandingkan dengan sesama akademis. Perbandingan semacam itu bagi penulis lebih adil ketimbang membandingkan akademis-aktivis yang indikator eksistensinya sering berbeda.

Hipotesa Gerakan (Lesu) Mahasiswa

Kita akan membahas dua dikotomi (akademis-aktivis) tadi secara meluas. Mari kita mulai dengan membahas kaum “pragmatis” yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi manfaat (daya guna). Misal, buat apa uang dipakai untuk membeli rokok yang kemudian dibakar? Mereka hanya melihat merokok sebagai ‘upacara kesia-siaan’ karena membakar uang. Padahal merokok bisa saja tentang sebuah nilai ideologis yang kental kaitannya dengan “rasa”. Sementara kaum satunya mempunyai sifat “materialis”, hanya melihat sesuatu yang real, tampak dan nyata. Misal, menggunakan uang untuk membeli meja dan harus ada mejanya, membeli jas harus ada jasnya. Kalau ditanya membeli kesenangan? Ribut berdalih. Kelompok semacam ini akan berhitung tidak hanya sekali dua kali ketika ditawari mengikuti pelatihan yang berbayar tanpa mendapat sesuatu yang real, tampak dan nyata.

Sementara gabungan dari materialis-pragmatis akan menilai segala hal yang bermanfaat harus terlihat nyata dan verbal. Kalau dalam bahasa penulis, hanya melihat kemanfaatan yang bisa dirasakan secara langsung dalam bentuk nyata (*directly advantage*). Tentu saja dua istilah filsafat “pragmatis” dengan “materealis” di sini bukan bermaksud seperti istilah yang ada di dalam buku-buku filsafat barat yang berat dan tebal. Tetapi sebatas pengertian sumir untuk memepermudah menjelaskan apa yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini.

Lantas bagaimana kalau sekarang sudah banyak mahasiswa kita yang laku dan pikirnya hanya berdasarkan landasan pragmatis dan matrealis an sich? Mahasiswa seperti ini akan berkencederungan serba oportunis, hanya mau melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan langsung untuknya, dan tentu keuntungananya haruslah nyata. Otak mereka akhirnya hanya sekadar kalkulator yang dipenuhi tombol penjumlahan,

pengurangan, perkalian serta pembagian (ekonometris). Penambahan peluang-peluang apapun yang mungkin bisa diraih, pengurangan kegiatan apa saja yang mungkin mengurangi keuntungan pribadinya (organisasi), serta perkalian dari rutinitas apa saja yang membuat akumulasi keuntunganya. Tetapi tombol pembagian akhirnya tidak pernah digunakan karena tidak sesuai dengan prinsip pragmatis-materialis.

Kecenderungan mahasiswa yang sudah terlanjur pragmatis-matrealis akhirnya menafikan "rasa" -yang memang sulit diukur dan diverbalkan. Rasa seperti yang dikatakan Quraish Shihab sebagai salah satu pembeda kualitas manusia, akhirnya tidak jarang dinaifkan dalam mengukur kualitas kemanfaatan diri. Padahal bagi penulis mahasiswa bisa dikatakan me'rasa' kalau dia sudah berani memenuhi panggilan takdirnya. Apa takdirnya? Takdir mahasiswa tentu saja membawa perubahan sosial, melakukan pergerakan, atau kalau ditarik lebih ekstrem, melakukan perlawanan. Takdir ini tentu sesuatu yang sulit dan berat, terlebih pasti akan dihindari kaum pragmatis-matrealis karena kecenderungan oportunistis tidak akan menguntungkan pribadi mereka.

Kenapa bisa seperti itu? Jawabanya tentu tidak bisa tunggal. Tetapi, sebatas hipotesa awal penulis, hal itu bisa disebabkan karena ahistorisitas mahasiswa terhadap takdirnya. Banyak mahasiswa yang tidak terlalu mengenal -atau cukup pengetahuanya- mengenai sejarah evolusi gerakan mahasiswa. Mahasiswa sekarang kekurangan jalur cerita untuk mengetahui serentetan sejarah panjang perlawanan dimana mahasiswa sering terlibat di dalamnya. Misal, sederet kalimat Gie berikut pasti sudah jarang yang mengenalinya, "*Tugas seorang sarjana adalah berfikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa lepas dari arus masyarakat yang kacau, tetapi mereka tidak bisa lepas dari fungsi sosialnya, yakni bertindak jika keadaan mulai mendesak. Kaum intelektual yang diam disaat keadaan mulai mendesak, telah melunturkan nilai kemanusiaan*."

Hal tersebut bisa saja karena opini publik yang terbentuk dari semangat model sastra kita, satra yang menjauhkan kita dari realitas sosial masyarakat kita. Bisa juga karena tayangan di media mainstream kita yang lebih dipenuhi tayangan drama yang mengaduk-aduk perasaan

ketimbang pikiran. Alasan lain yang lebih menakutkan tentu saja ketidaksadaran mahasiswa yang sebenarnya sedang dikurung dalam perangkap "*one dimention man*.". Dalam bahasa penulis, mahasiswa sekarang cenderung melakukan penolakan takdirnya sebagai mahasiswa (*fate avoidance!*) Mereka lebih memilih berjualan hijab demi mendakwahkan nilai-nilai konsumeris yang mereka imani sebagai nilai religius, dan atau hanya sibuk mengkalkulasi IPK sebagai hasil linier kesuksesan. Mereka ketakutan menerima nasib sebagai mahasiswa yaitu, melakukan "gerakan perlawanan."

Kompas (16/8/2016) pernah melakukan riset yang menunjukan penurunan minat mahasiswa untuk ikut berproses dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Beberapa alasan menurunnya minat tersebut karena banyaknya mahasiswa yang disibukkan dengan kegiatanya di "lapak" online. Mereka menjajakan berbagai produk untuk mendapat pendapatan tambahan. Jika kegiatan ini diganggu dengan ikut bergabung dengan UKM, maka laba jualan dari "lapak" akan berkurang. UKM bagi penulis memang berkecenderungan menawarkan *inderectly advantage* (kemanfaatan yang tidak langsung) untuk mahasiswa. Segala keuntungan yang ditawarkannya membutuhkan proses waktu yang begitu lama. Jika mayoritas pragmatis-materialis, tentu kita sudah tahu apa jawaban mahasiswa jika tawarannya; membuka "lapak" atau berkegiatan di UKM?

Alasan lainnya tentu untuk fokus akademis, mencari IPK tinggi untuk mempermudah syarat bisa terbang ke luar negeri. Fokus ini tentu tidak bisa kita naifkan dengan perkembangan Perguruan Tinggi yang sudah menjadi komoditas ekonomi jasa -sesuai ramalan Daniel Bell dalam Masyarakat Pos-Industrinya, atau dalam bahasa Paulo Freire, pendidikan sebagai l*ink and match* sesuai tuntutan dunia industri. Zaman modern yang semakin maju membuat dunia kerja hanya membutuhan kaum-kaum profesional, terutama di bidang jaasa, konsultan, dokter, dosen, perawat dll. Kebutuhan akan kaum profesional menggiring banyak orang untuk oportunis, mementingkan dirinya untuk mampu mencapai titik tertentu agar bisa dinilai dan diverifikasi sebagai profesional oleh dunia kerja yang dituju. Sementara pada tingkatan mahasiswa, hal itu dilakukan dengan berlom-

ba adu tinggi angka IPK. Riset kompas ini tentu memperkuat keyakinan penulis terhadap hipotesa awal tentang gerakan (lesu) mahasiswa.

Sekali lagi, hidup yang sebenarnya itu bukan hidup sendiri atau bersifat egosentris, tetapi kemampuan memberi hidup dan sarana kehidupan kepada pihak lain. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainya. Islam menyimpan ajaran yang sangat menjauhkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya semata. Maka berorganisasi adalah salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hirarkis kehidupan melalui tiga ciri utamanya, gerak, rasa dan pengetahuan. Berorganisasi artinya secara sadar dan bertanggungjawab ingin menjadi pribadi dengan kualitas yang kian baik dan mulia.

Sibuk mengerjakan tugas demi nilai kuliah dalam konteks sosial tidak ada bedanya dengan tidur. Keduanya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, jika tidak dilakukan hanya diri sendiri yang rugi, pun sebaliknya, jika dilakukan hanya diri sendiri yang untung. Meski begitu, dalam konteks pribadi mengerjakan tugas tetap lebih baik jika dibandingkan dengan tidur. Tetapi dalam konteks sosial, keduanya tidak mendapat perbedaan kualitas yang signifikan.

Kontekstualisasinya di PMII

Maka, bergabung dengan PMII harusnya membantu kita menuju tangga hirarkis kualitas kehidupan. Dengan PMII kita bisa lebih leluasa bergerak, bisa menempa pengetahuan yang lebih mendalam dan tidak sekedar pengatahuan yang remeh. Maka gerak dan pengetahuan tersebut akan menghasilkan kedalaman perasaan pada setiap titik kehidupan kita. Bergabung dengan PMII berarti siap meninggalkan kenyamanan pribadi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang tidak egosentris. Ber-PMII dalam konteks historisitas akan menghindarkan kita dari *fate avoidance* (penghindaran takdir). Terakhir, pertanyaan yang penuh rasa penasaran harus dikemukakan, "*Apa menariknya jika hidup hanya selalu untuk diri sendiri?*"

Maka suatu saat jika mendengar ada yang membanding-bandingkan mana yang lebih baik antara akademis dengan aktivis, kita harus tahu

di mana selaiknya memberatkan timbangan penilaian tersebut dalam konteks sosial. Meski begitu, menjadi akademis atau aktivis bukan untuk masalah kebanggan, tetapi panggilan takdir historis kehidupan yang menuntut mahasiswa terus mencapai titik potensial kualitas tertinggi yang bisa ia capai. Terakhir, untuk refleksi seberapa baik kualitas kita, tentu ukuran seluas apa gerak, pengetahuan dan rasa kita adalah alat ukur sederhananya.

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan Pengkaderan PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

SAHABAT, MUNGKIN KITA **TERLALU SIBUK DAN LALAI**

Mungkin, kita terlalu sibuk memikirkan dan memperjuangkan hal-hal besar, namun seringkali lalai terhadap hal-hal kecil yang (mungkin) bisa menghancurkan hal-hal besar yang selalu kita fikirkan dan perjuangkan.

Sebagai kader PMII, tentu kita memiliki narasi besar tentang keorganisasian maupun kebangsaan berlandaskan nilai-nilai keislaman ala *Ahlus Sunnah wal Jam'ah an-Nahdliyyah* yang sudah terpatri dalam diri sejak dinyatakan lulus MAPABA dan dibaiat sebagai anggota PMII. Narasi-narasi tersebut tentu tidak muncul dengan sendirinya.

Penulis husnudzon bahwa narasi tersebut muncul berdasarkan hasil refleksi kita atas tujuan PMII. Tentu sahabat-sahabati masih ingat kan apa itu tujuan PMII? Sebagai pengingat bersama, biarlah penulis kutipkan tujuan PMII sebagaimana tertulis dalam pasal 4 AD PMII:

> "Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah Swt, berbudi luhur, berilmu, cakap, bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia."

Ya, inilah tujuan PMII yang selalu dijadikan dasar oleh pengurus di berbagai tingkatan dalam merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan.

Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan narasi besar kita sahabat? Membaca, berdiskusi, menulis, dan bahkan juga turun jalan untuk mewujudkan narasi tersebut. Apakah salah? Tentu tidak. Mahasiswa selalu identik dengan nilai intelektualitas dan semangat kepemudaan. Sedangkan perubahan -ke arah yang lebih baik- umumnya selalu dicitakan oleh para pemuda (tidak percaya? Silahkan baca ulang sejarah bangsa ini).

Keempatnya, merupakan ruh kita sebagai organisasi mahasiswa, sebagai organisasi pengkaderan yang harus kita jaga dan laksanakan bersama-sama. Bukankah kita juga mengenal adagium yang berbunyi, "*Cah PMII ora gelem moco, ora seneng diskusi, ora gelem nulis, ora iso orasi, mending bali omah.*"

Namun, sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama', sebagai organisasi yang berideologikan pancasila, berhaluan *Ahlus Sunnah wal Jam'ah an-Nahdliyyah*, seringkali kita lupa atau mungkin menganggap enteng dengan fakta yang menunjukkan bahwa kader terbesar kita adalah alumni pesantren, alumni sekolah ma'arif, alumni madrasah aliyah yang kemudian meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi berbasis keagamaan.

Kita sering lalai pada alumni dari berbagai SMA Negeri yang –terlanjur-dianggap sebagai SMA unggulan dan meneruskan ke berbagai perguruan tinggi umum nan favorit yang dikuasai oleh "kawan-kawan" kita. Sebagian dari mereka, tentu saja akan bergabung dengan "kawan-kawan" kita yang terlihat lebih islami dari kita dengan berbagai simbol yang dikenakan. Sementara sebagian yang lain akan acuh perihal keorganisasian. Hanya sedikit dari mereka yang akan bergabung dengan kita, yakni mereka yang memang besar dalam kultur *Nahdliyyin*. Hal ini juga tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan bergabung dengan kita serta memperjuangkan narasi kebangsaan sebagaimana yang kita lakukan.

Barangkali akan muncul pertanyaan, apa pentingnya alumni-alumni SMA Negeri yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi umum namun tidak bergabung dengan PMII? Bukankah lebih penting ngopeni kader yang nyata-nyata sudah bergabung dengan PMII? Mencerdasakan mereka dan kemudian mendistribusikan mereka ke berbagai sektor sesuai kemampuan yang dimiliki? Dan bukankah lebih penting lagi memikirkan dan memperjuangkan bangsa yang semakin tak karuan ini? Jika pertanyaan seperti ini muncul, maka di sinilah letak kelalaian kita. Lalai karena terlalu sibuk dengan narasi keorganisasian dan kebangsaan yang kita bangun lewat PMII.

Padahal ruang semacam itu sudah digarap oleh "kawan-kawan" kita. Mereka memiliki sayap organisasi di SMA-SMA Negeri -meski tidak secara struktural. Sayap itu bernama Rohis. Lihat, betapa dekatnya nilai keislaman yang dimiliki oleh Rohis dengan LDK yang menjadi sayap organisasi "kawan-kawan" kita di kampus. Dalam hal ideologisasi, kita hanya kalah satu langkah dibandingkan "kawan-kawan" kita. Meski hanya satu langkah, namun kekalahan ini sudah kita alami selama bertahun-tahun tanpa kita sadari, atau mungkin sadar namun kita enggan mengakui kekalahan kita.

Jika kita menggarap ruang itu, apakah ada jaminan bahwa mereka akan bergabung dengan PMII setelah masuk ke perguruan tinggi? Munculnya pertanyaan semacam ini yang kemudian membuat kita melepaskan ruang garapan tersebut, menunjukkan betapa kerdilnya cita kita sebagai kader PMII yang memiliki narasi kebangsaan berlandaskan nilai keislaman ala *Ahlus Sunnah wal Jam'ah an-Nahdliyyah*.

Membuat mereka bergabung dengan PMII memang penting. Tapi, jika mereka tidak bergabung dengan PMII, penulis tawarkan sebuah pertanyaan, "Mana yang lebih penting, antara melihat mereka bergabung dengan "kawan-kawan" kita yang tentu narasi kebangsaannya jauh berbeda dari apa yang kita perjuangkan, atau melihat mereka menjadi kelompok netral namun memiliki narasi kebangsaan berlandaskan nilai keislaman ala Ahlus Sunnah wal Jam'ah an-Nahdliyyah?"

Maka, keinsyafan akan hal tersebut, seharusnya membuat kita mulai menggarap ruang yang selama ini hanya digarap oleh kawan-kawan kita. Setidak-tidaknya, jika mereka tidak bergabung dengan PMII, mereka telah memiliki narasi kebangsaan sebagaimana yang kita yakini dan perjuangkan. Ini adalah bentuk jihad kebangsaan, menebarkan gagasan kebangsaan berlandaskan nilai keislaman ala *Ahlus Sunnah wal Jam'ah an-Nahdliyyah*. Jika Nahdlatul 'Ulama menjadi benteng terakhir NKRI dalam seluruh sektor kehidupan, maka PMII harus membantu NU, menjadi benteng terkahir bagi NKRI di tingkat kemahasiswaaan.

Untuk mengakhiri tulisan ini, izinkan penulis bertanya pada sahabat-

saahabati, sudahkah agenda ngopi dan diskusinya terlaksana hari ini? Jika sudah, penulis doakan semoga agenda rutinan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Jika belum, mari segera pergi ke warung kopi, *broadcast* pesan kepada sahabat-sahabati yang lain untuk duduk bersama dan mari diskusikan narasi besar kita tentang keislaman, kebangsaan, serta strategi untuk mencerdaskan kader-kader kita. Bukankah selama ini kita memang seperti itu? Terlalu sibuk memikirkan dan memperjuangkan hal-hal besar, namun seringkali lalai terhadap hal-hal yang kita anggap kecil namun bisa menghancurkan hal-hal besar yang selalu kita fikirkan dan perjuangkan. *Wallahu a'lamu bish showwab.*

Disclaimer: Penulisan *Ahlus Sunnah wal Jam'ah* ditambah dengan kata *an-Nahdliyyah* penulis gunakan untuk mebedakan nilai-nilai *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang kita anut dengan nilai-nilai *Ahlus Sunnah wal Jamaah* yang dianut oleh "kawan-kawan" kita maupun kelompok lain, yang tentu beda ideologi.

Penulis: ***Moeh. Zaenal Abidin***

(Ketua II PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

BERORGANISASI
DENGAN PENGETAHUAN

Bukankah yang membedakan proses-proses politik di PMII adalah berkomunikasi dan berwacana yang nantinya bermuara pada gerakan sosial yang maksimal, bukan perebutan dan pembagian kekuasaan seperti yang terjadi di negeri amplop?

Kewajiban apa yang pertama harus dilakukan departemen pengaderan? Begitulah pertanyaan terhadap diri penulis ketika ditunjuk menjadi Departemen Pengaderan PMII di tingkat rayon beberapa tahun silam.

Pengaderan di tingkat rayon merupakan tingkat pertama dalam jenjang pengaderan dalam organisasi yang setia menjadikan Aswaja sebagai *manhaj* pergerakannya. Departemen Pengaderan di tingkat rayon memiliki tugas berbeda dengan Departemen Pengaderan di level komisariat, sampai seterusnya.

Jelas, tugas pertama Departemen Pengaderan tingkat rayon adalah meneruskan mengajak mahasiswa baru bergabung dengan PMII. Tujuannya sederhana, namun rumit atau tidak mudah praktiknya: mewariskan semangat gerakan perlawanan atas ketidakadilan, yang di dasarkan atas nilai-nilai dasar pergerakan, yang tiga itu.

Setelah berhasil mengajak mahasiswa baru bergabung, Departemen Pengaderan dihadapkan dengan berbagai hal. Dalam mendampingi,

mendidik, mengader ternyata tidak serta merta membuat program revolusioner, yang bisa meningkatkan kapasitas anggota baru. Kadang justru yang pertama kali dihadapi setelah MAPABA, adalah bagaimana menguatkan bangunan emosional anggota baru, biar tetap bertahan di PMII. Kadang, hal ini pula yang membuat PMII, yang notabenenya sebagai organisasi pergerakan, menjadi sekedar kerumunan.

Berorganisasi dengan Pengetahuan

Penulis dulu sering mengajukan pertanyaan kepada calon ketua angkatan di tingkat rayon: kelak, mana yang akan kamu dahulukan, ketika dihadapkan dengan dua pilihan, memimpin dengan pengetahuan atau perasaan?

Kebanyakan mereka menjawab akan memadukan keduanya. Tentu jawaban yang menarik. Tapi penulis berpikir, bagaimana caranya? Mungkinkah?

Dari pengalaman penulis di PMII, masih banyak anggota, maupun kader yang berorganisasi tidak dengan pengetahuan, namun dengan perasaan. Tentu jika hal itu terjadi satu bulan-dua bulan, katakanlah sampai adanya Pelatihan Kader Dasar (PKD), itu wajar. Namun kadang hal semacam itu masih terjadi sampai jadi pengurus.

Penulis berkesimpulan, jika sampai jadi pengurus, masih berorganisasi dengan perasaan, maka inilah salah satu tanda kegagalan Departemen Pengaderan di tingkat rayon.

Apakah berorganisasi dengan pengetahuan lantas menghilangkan perasan? Tentu tidak.

Ada yang menarik dari pemikiran Murtadha Muttahari, tentang perbedaan perasaan dunia dan pengetahuan dunia, yang penulis anggap relevan disampaikan dalam konteks ini.

Menurutnya, perasaan bukanlah pengetahuan. Pengetahuan adalah khas manusia. Binatang dan manusia sama-sama merasakan alam, namun hanya manusia yang mampu mengetahui dan menerangkannya.

Bisa jadi yang penulis maksud dengan perasaan berbeda dengan yang dimaksudkannya. Namun penulis ketika membacanya memperoleh inspirasi, bahwa perasaan, walau berbeda dengan pengetahuan, namun tidak bertentangan. Pengetahuan adalah mode yang lebih tinggi dari perasaan. Pengetahuan adalah kemampuan menjelaskan perasaan atau apa yang dirasakan.

Tugas Departemen Pengaderan tingkat rayon adalah membantu transformasi anggota baru, dari berorganisasi dengan perasaan menuju ke tingkat yang lebih tinggi: berorganisasi dengan pengetahuan.

Ketika kader PMII sudah berorganisasi dengan pengetahuan, segala permasalahan, entah yang bersifat organisasi atau antar individu kader, akan terjelaskan, sehingga bisa terselesaikan.

Berorganisasi yang Komunikatif

Berorganisasi dengan pengetahuan juga pada akhirnya akan menciptakan keberanian mengkomunikasikan berbagai gagasan, tanpa terbebani rasa tidak enak ketika berbeda. Kelahiran-kelahiran gagasan brilian, dan eksekusi yang sistematis dan terstruktur pun menjadi mungkin terjadi.

Kemampuan komunikasi yang baik antar anggota organisasi selanjutnya akan mendorong kepada cara pandang yang tak sempit, dan mampu melihat dari kaca mata orang lain. Ini tentu sangat baik bagi perkembangan kader, apalagi juga sudah berada di level komisariat, cabang dan seterusnya, yang memungkinkan bertemu dengan kader-kader lain, yang memiliki gagasan dan wacana yang bisa berbeda. Berorganisasi dengan komunikatif, maka PMII ku akan melebur dengan PMII Anda dan memunculkan PMII Kita, secara komunikatif dan tanpa keterpaksaan.

Selain itu, Ketika kader sudah berada di tingkat komisariat, cabang dan seterusnya, proses-proses politik antar rayon, komisariat, cabang, sampai ke tingkat pusat tentu tak bisa dihindarkan. Dengan berorganisasi secara komunikatif sejak awal, proses-proses politik tersebut akan dimaknai bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan berkomunikasi dan berwacana.

Memahami politik sebagai berkomunikasi dan berwacana adalah pandangan Habermas, yang penulis kutip dari Sindhunata. Dengan pengertian politik seperti ini, kemungkinan lahir pemimpin yang benar-benar punya kapasitas di berbagai level, mulai rayon sampai pusat, sangat besar. Bukankah yang membedakan proses-proses politik di PMII adalah berkomunikasi dan berwacana yang nantinya bermuara pada gerakan sosial yang maksimal, bukan perebutan dan pembagian kekuasaan seperti yang terjadi di negeri amplop?

Bukankah salah satu pilar dari Aswaja adalah prinsip bermusyawarah, yang bahannya adalah komunikasi dan wacana?

Penulis: ***Zaimuddin Ahya***

(Departemen Pers dan Teknologi Informasi PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

MENEGUHKAN
ORIENTASI BER-PMII

Jika setiap orientasi sahabat-sahabati ber-PMII dimuarakan pada kesadaran orientasi perubahan sosial, maka kita tidak sekadar mencari pengalaman namun hanya menemukan kelelahan.

Pernahkan sahabat-sahabati pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di tingkat Rayon, Komisariat atau Cabang menanyakan pada kader satu per satu: apa orientasinya bergabung dengan PMII? Jawabannya tentu jamak. Orientasinya bergabung; bisa berawal dari dorongan keinginan pribadinya, bisa juga pengaruh dari lingkungan. Mari kita bahas terlebih dahulu orientasi ber-PMII karena lingkungan.

3 Orientasi Jamak ber-PMII

Penulis mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan jawaban apa saja orientasi beberapa orang akhirnya memutuskan ber-PMII. Pertama, "*nambah* pengalaman". Hal ini bisa terjadi terhadap beberapa mahasiswa yang sebelumnya belum pernah punya pengalaman cukup dalam interaksi sosial (berorganisasi) baik di sekolah maupun masyarakat. Pengalaman berorganisasi seolah menjanjikan suatu proses pendewasaan yang bertahap yang mungkin mereka bisa ikuti ritme perkembangannya. Bagi yang sudah punya pengalaman organisasi, tentu berorganisasi semasa

kuliah dengan status “mahasiswa” akan jauh berbeda kualitas-kualitas pengalamannya. Mereka bisa meningkatkan kualitas pribadinya dengan modal yang sudah dimiliki. Biasanya orang seperti ini akan lebih mudah dan cepat bersinar di PMII pada masa paska MAPABA awal, nampak berkliau dan menjanjikan kecemerlangan regenerasi.

Kemungkinan orientasi kedua adalah alasan “menambah teman”. Sebagai organisasi pengkaderan yanng tidak jarang menargetkan perekrutan dalam jumlah besar, ber-PMII berarti menjanjikan suatu hubungan intim dengan lebih banyak teman. Apalagi jika dilihat dari tren MAPABA di Komisariat Walisongo, sekitar 1500-an anggota baru PMII per tahun siap membuat data di kontak ponsel bisa overload! Siapa yang tidak tergiur? Misal, selama Anda punya masalah dan masih berada di sekitar Ngaliyan, hubungi sahabat-sahabati baru kalian, hasilnya bisa diduga, solidaritas paska MAPABA selalu bisa diandalkan sebagai solusi. Mulai dari sahabat-sahabati yang menghapus kelaparan di tengah kantong kering, membawakan botol aquil berisi bensin saat motor mogok karena tangki motor kering, atau sekadar adu coret wajah dalam permainan kartu sampai tengah malam. Sahabat baru juga bisa menghapus kesedihan sementara akaibat jurusan kuliah yang sebenarnya tidak sesuai keinginan kita semula. Ajaib!

Kemungkinan orientasi ketiga adalah “jaringan”. Beberapa orang yang sudah punya wawasan organisasi, tentu akan sangat paham akan hal ini. Lazimnya sebuah organisasi yang punya sistem hirarki dan mencakup skala nasional serta punya kesejarahan panjang, maka PMII juga menjanjikan berbagai jaringan sesuai keinginan kita. Jaringan pengetahuan, jaringan ekonomi, jaringan sosial, jaringan politik sampai jaringan yang remeh temeh tapi vital seperti “percintaan”. Jaringan ini bisa kita dapat kadar kualitasnya dengan berbanding linier dengan tingkat hirarki dimana kita sedang berproses (Rayon, Komisariat, Cabang). Ketiga hal ini tidak jarang sering diobral dalam berbagai model diksi dan redaksi untuk meyakinakan mahasiswa baru untuk mau ber-PMII. Sekurang-kurangnya bagi penulis, jika benar-benar diadakan survei maka tiga orientasi tersebut pasti menempati posisi 3 teratas jawaban sahabat-sahabati.

Orientasi Perubahan Sosial

Penulis tidak ingin menyeret faktor lingkungan tersebut menjadi suatu permasalahan yang ingin didiskusikan dalam tulisan ini. Penulis lebih meninginkan wacana ber-PMII yang muncul dari diri sendiri yang berorientasi pada perubahan sosial. Jadi, sebenarnya ber-PMII adalah tentang bagaimana kita bisa terlibat dalam siklus perubahan sosial (menuju keadaan yang lebih baik). Memang pembedaan ini sangatlah sumir dengan landasan espitimologi yang tipis, tetapi hal ini tetap perlu dikemukakan mengingat bahaya laten dari 3 orientasi yang sudah terlanjur jamak kita temukan tadi.

Bahaya laten dari 3 orientasi yang jamak tadi, jika tidak diikuti dengan orientasi pada perubahan sosial, maka akan menghasilkan kader yang oportunis dan sering terjebak pada euforia yang kering subtansi. Kenapa menjadi oportunis? Karena dengan 3 orientasi tersebut berkecenderungan menciptakan kader yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari PMII tanpa harus punya rasa tanggungjawab moral yang lebih terhadap berbagai permasalahan sosial. Misal, dengan orientasi mempunyai bekal pengalaman hidup yang cukup, seorang kader merasa akan terbantu dalam kehidupannya bermasyarakat kelak. Orientasi banyak teman juga sama, menjanjikan kemudahan hidup yang berasal dari kemungkinan mendapat bantuan dari keragaman latar belakang (jurusan yang beragam) sahabat-sahabati yang dimilikinya. Jaringan pun sama, hanya akan sebatas sampai dimana bisa dipakai untuk menunjang karir pribadinya.

Hal yang perlu ditekankan bukanlah menyalahkan 3 orientasi tersebut, tetapi pemaknaan bahwa 3 orientasi tersebut sebagai sungai yang bercabang dan muara akhirnya adalah samudra "perubahan sosial". Jadi, salah besar jika pengalaman yang didapat selama ber-PMII hanya dimaknai secara oportunis. Pengalaman tersebut harus dimaknai sebagai ruang waktu pendewasaan dan pengayaan spiritual kita dalam memotret lengkap fenomena sosial. Pengalaman ber-PMII akan membantu kita dalam menentukan sikap politik dan sikap keagamaan kita di tengah masyarakat. Sikap-sikap tersebutlah yang akan membawa kita memungkinkan bisa menyumbang suatu perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih

baik. Syaratnya satu, selama ber-PMII kita harus benar-benar merekam semua proses kita yang hirarkis tersebut. bisa ditafsirkan merekam dalam ingatan atau merekam dalam bentuk tulisan dalam berbagai media.

Selanjutnya berteman, orientasi ini seharusnya juga didasari kepada media perubahan sosial. Misal, menghadapi berbagai permasalahan sosial yang kompleks, tentu kita perlu menganalisis dengan berbagai pendekatan; agama, sosiologi, ekonomi, politik sampai fakta-fakta sejarah. Semakin banyak teman dengan keragaman latar belakang keilmuan yang dimiliki, memungkinkan kita mempunyai pisau analisis tertajam yang mampu mengupas berbagai masalah sosial yang kompleks sampai pada lapisan terdalamnya. Hal ini juga bukan tanpa syarat, berteman dengan orientasi perubahan sosial artinya memperbanyak diskusi serius di ruang-ruang terbuka yang tidak terikat proker organisasi. Budaya "ngopi" tidak bisa dipertahankan selama budaya tersebut tidak diisi dengan berbagai diskusi yang berisi. Batas bercanda ria dalam pertemanan ini harus mampu membedakan kapan waktu untuk serius berdiskusi. Pertemanan dalam ber-PMII harus mampu membuat kita menanggung hal yang sama terhadap permasalahan sosial yang sedang melanda masyarakat. Pertemanan ber-PMII harus mampu mengajukan berbagai pemecahan sosial yang dijemur berjejer di gantungan kawat halaman rumah masyarakat.

Terakhir, jaringan. Menghadapi musuh yang punya kekuatan lebih kuat secara sistemik (rezim dhalim) mengharuskan kita harus berjejaring dengan lebih banyak elemen di luar PMII. Misal dengan LSM, Organisasi Ekstra Mahasiswa, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat sampai berbagai sektor militer dan kepolisian, kalau perlu berjejaring juga dengan anggota rezim tersisa yang masih punya kebaikan. Semua ini berangkat pada kesadaran bahwa perubahan sosial yang lebih besar membutuhkan elemen yang lebih banyak. Jadi, jika setiap orientasi sahabat-sahabati ber-PMII dimuarakan pada kesadaran orientasi perubahan sosial, maka kita tidak sekadar mencari pengalaman namun hanya menemukan kelelahan. Tidak hanya berteman tetapi sedikit mendapat kemanfaatan. Bahkan tidak sekadar mengantongi berbagai jaringan hanya untuk membuat beberapa pelatihan dan seminar yang seringnya jauh dari cita-cita peru-

bahan sosial. Sudahkan anda "*ngopi*"? Lalu, dengan siapa saja dan mendiskusikan apa? Jaringan apa yang ingin kalian dekati setelah "*ngopi*"? Silahkan ceritakan pada kami.

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan Pengkaderan PMII Kota Semarang 2016-2017)

(KADER) PMII
(SOK) KE-KIRI-KIRI-AN

Ilmu pengetahuan, dari manapun asalnya harus tetap diterima dan dipelajari sebagai pengetahuan, tidak boleh ada otoritas apapun yang melarangnya, termasuk negara.

Sejarah kemerdekaan Indonesia yang begitu revolusioner, penuh pengorbanan dan berdarah-darah, sedikit-banyak, tentu saja mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan tindakan kader-kader PMII yang pernah membacanya. Setidaknya, itulah yang penulis rasakan pada masa awal bergabung dengan PMII dan kemudian melahap satu-dua buku tentang sejarah gerakan era pergerakan nasional hingga perjuangan kemerdekaan dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap rezim yang menindas.

Saat itu, sebagai anggota yang baru saja saja lulus MAPABA, penulis begitu bersemangat membaca buku-buku tentang gerakan perlawanan dan teori-teorinya, terlebih buku-buku yang membincang heroisme gerakan mahasiswa. Sejak itu pula, penulis percaya bahwa kiri itu identik dengan gerakan perlawanan, anti-penindasan, menghendaki masyarakat yang adil dan makmur, menentang penghisapan manusia atas manusia -exploitation de l'homme par l'homme- sebagaimana pernah disampaikan Bung Karno. Sementara kanan adalah sebaliknya, pro *status quo*, pro penindasan, pro eksploitasi, sehingga harus dilawan. Entah dengan kader-kader yang lain.

Barangkali, apa yang penulis rasakan merupakan akibat dari liberasi pemikiran yang kemudian memunculkan Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran dan Paradigma Kritis Transformatif dalam tubuh PMII pada

dekade ‘90an. Menurut cerita, saat itu kebanyakan kader-kader PMII begitu menggandrungi teori-teori kritis Madzhab Frankfurt, teologi pembebasan ala Ali Syariati, Asghar Ali, Hassan Hanafi, dan bahkan mengelaborasi konsep keadilan (*al-adalah*), toleransi (*tasamuh*), moderat (*tawassuth*) dan keseimbangan (*tawazzun*) dengan konsep pemikiran politik barat, seperti teori-teori Marx, Talcott Parsons dan lain sebagainya. Pola pikir yang memang sesuai semangat zaman, untuk melawan kesewenang-wenangan rezim dikator Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Mari kita lihat rumusan spektrum ideologi yang pernah dikemukakan oleh Sahabat Munandar Nugraha, seorang dosen FISIP di UNAS yang kiranya menarik untuk membincang posisi -kader- PMII Kota Semarang berdasar rumusan tersebut. Kiri mentok adalah komunisme, kiri tengah adalah sosdem, tengah adalah pancasila, kanan tengah adalah demokrasi/ liberalisme, kanan mentok adalah ekstrimis kapitalisme, fasisme, dan fundamentalis-radikalisme. Kira-kira begitu rumusannya.

Jika melihat rumusan spektrum ideologi diatas, maka kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa PMII berada tepat di tengah-tengah, bukan kiri tengah maupun kanan tengah, apalagi kiri *mentok* dan kanan *mentok*. Jika tidak percaya silahkan buka ADRT PMII. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa PMII berasaskan Pancasila yang telah disebutkan dengan jelas sila per sila nya dalam alenia pertama Pembukaan ADRT PMII. Lihat, betapa pancasilais-nya PMII sebagai organisasi.

Patut disayangkan jika hari ini, masih ada kader-kader PMII yang *petentang-petenteng*, *ngalor-ngidul* sambil berkata bahwa dirinya adalah marxis, sok kiri -entah itu kiri *mentok* atau kiri tengah, namun melupakan narasi besar dibalik sejarah berdirinya PMII. Dan lebih disayangkan lagi, jika mereka yang mendaku-daku dirinya sebagai marxis, sebenarnya, belum pernah sama sekali membuka lembar demi lembar Das Kapital-nya Marx. Mengenaskan bukan? Maka, ini harus segera dibenahi.

Jika perlawanan identik dengan kiri, maka apakah ada yang salah dengan gerakan perlawanan yang selama ini coba dibangun oleh -kader- PMII Kota Semarang? Tidak, tidak ada yang salah dalam hal itu, bahkan itu

adalah perkara luar biasa. Sebab, -kader- PMII Kota Semarang melawan untuk menegakkan keadilan, melawan *dzulm*, sebagimana dicontohkan oleh para Nabi ketika melawan *mustakbirin* untuk membela *mustadh'afin*. Bagi penulis, yang salah adalah mereka yang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa melihat perlawanan itu dilakukan -meski dengan tulisan-, dan justru menyalahkan kita yang sedang melawan. Penulis bersama sahabat-sahabat yang lain juga dengan senang hati melakukan perlawanan tersebut dalam berbagai kesempatan.

Namun yang perlu digaris bawahi adalah tidak perlu mendaku diri sebagai seorang marxis -sebagai orang kiri- untuk melakukan perlawanan. Kita punya akar ideologi sendiri, Pancasila. Kita punya haluan sendiri dalam melakukan perlawanan, *Ahlussunnah wal jamaah* dengan keempat prinsipnya: keadilan (*al-adalah*), toleransi (*tasamuh*), moderat (*tawassuth*) dan keseimbangan (*tawazzun*). Nabi Muhammad SAW, telah mencontohkan kepada kita tentang perlawanan terhadap kedzaliman ketika mendakwahkan *Laa ilaaha illa Allah* yang berarti pula penolakan untuk mengakui otoritas kelompok yang berkuasa dan struktur sosial pada masanya dan kemudian membentuk mayarakat egaliter di Madinah, ribuan tahun sebelum Karl Marx mencetuskan idenya tentang masyarakat tanpa kelas. Kita hanya perlu mengelaborasinya lebih jauh lagi.

Sebelum tulisan ini diakhiri, penulis ingin menegaskan bahwa tulisan ini bukan berarti larangan bagi kader-kader PMII untuk mempelajari pemikiran-pemikiran kiri. Penulis tidak senaif itu. Ilmu pengetahuan, dari manapun asalnya harus tetap diterima dan dipelajari sebagai pengetahuan, tidak boleh ada otoritas apapun yang melarangnya, termasuk negara. *Wallahu a'lamu bis showwab*.

Penulis: ***Moeh. Zaenal Abidin***

(Ketua II PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

MEMPERTANYAKAN FILOSOFI **PENGKADERAN KITA**

Apakah selama ini kita sudah menggunakan suatu landasan filosofis dalam pola pengkaderan kita?

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi pengkaderan. Tanpa menganggap remeh Departemen lainnya, kita harus berani mengakui bahwa Departemen Pengkaderan memang memegang fungsi penting di PMII. Jika proses perjuangan PMII dalam mewujudkan tujuannya diibaratkan lomba lari estafet, maka pengkaderan adalah tongkat yang digilir pelari untuk dibawa sampai garis finish. Jika sekencang apapun seseorang berlari dalam perlombaan, tetapi tanpa membawa tongkat stik, dia tidak bisa dianggap juara. Percuma jika semua program kerja berjalan sukses, tetapi pengkaderan jeblok. Karena dosa paling besar berproses di PMII adalah gagal menciptakan generasi selanjutnya menjadi lebih baik dibandingkan dengan generasi sekarang. Di sini, penulis ingin menegaskan jika kapasitas pengurus (di semua tingkatan) dalam memastikan kelancaran proses kaderisasi merupakan harga mati! Tidak bisa tidak dan tanpa nego!

Sebelum jauh pembahasannya, penulis ingin meluruskan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, memang proses pengkaderan secara formal menjadi tupoksi Departemen Pengkaderan, tetapi mari kita bawa bacaan pengkaderan ini kepada suatu proses yang lebih luas. Proses yang mendarah dan mendaging yang tidak bisa kita pisahkan dari sekecil apapun proses di PMII. Hal ini semacam kontekstualisasi dari keterangan yang

menjelaskan bahwa selama ini PMII memiliki konsep pengkaderan formal dan non formal. Dikotomi tersebut sebenarnya juga menarik diperdebat-kan (atau didiskusikan), tetapi mungkin itu akan dibahas dalam tulisan lain. Disini penulis ingin menegaskan pengkaderan seperti apa yang hen-dak ditulis.

Definisi Pengkaderan

Penulis ingin membatasi penjelasan pengkaderan sebagai "proses spiritual untuk menciptakan anak rohani yang seideologi dengan kesa-maan visi, berbasiskan potensi kader dengan cara proyek percontohan". Pertama, kaderisasi harus dimaknai sebagai sebuah proses spiritual bu-kan proses organisasi. Hal tersebut lebih kepada kesadaran yang harus dibangun; jika perjuangan PMII dan tafsir perjuangan versi kita pribadi tidak mungkin bisa terwujud tanpa bantuan orang lain (semakin banyak orang yang membantu akan semakin baik). Apalagi keterbatasan ruang dan waktu yang kita miliki tidak berbanding lurus dengan luas dan ru-mitnya permasalahan yang harus PMII hadapi. Maka melahirkan anak-anak rohani yang seideologi dan sevisi ini bagi penulis adalah proses pe-nyambungan tongkat estafet.

Selanjutnya, berbasiskan potensi kader. Hal ini lebih kepada landasan filosofis apa yang harus kita pakai dalam kacamata pengkaderan yang kita laksanakan. Apakah kita menganggap kader seperti kertas kosong (tabula rasa) atau setiap kader sudah mempunyai kecenderungan potensinya masing-masing? Jika kita memakai kacamata kertas kosong, maka wajar jika pola pengkaderannya hanya penjejalan. Kader akan sepenuhnya diar-ahkan. Tetapi jika kacamata yang kita gunakan adalah yang kedua, maka sebenarnya kita tinggal menggali apa potensinya, apa kecenderungan-nya. Tetapi sepengetahuan penulis PMII sudah bagus dengan mayoritas mengkombinasikan dua pola kacamata pengkaderan ini sesuai kebutu-han masing-masing di setiap situasi sosial yang beragam.

Terakhir, proyek percontohan. Sebelumnya penulis ingin bertanya, apakah boleh kita memintarkan kader tetapi kita sendiri bodoh? Sebera-pa banyak orang yang merasa heroik karena merasa telah memintarkan

beberapa kader meskipun sepenuhnya dirinya sadar bahwa dia tidak bertambah pintar? Sekilas, jika kita percaya bahwa pengkaderan hanya sekadar kewajiban memintarkan kader maka hal tersebut tidak salah. Tetapi jika konsep pemaknaan pengkaderan sebagai proses spiritual, maka hal itu bisa dianggap salah. Banyak kaidah dalam Islam yang mengajarkan bahwa kita harus bisa melaksanakan kebaikan yang kita nasihatkan kepada orang lain. Bahkan kebijaksanaan jawa juga mengajarkan lewat adigiumnya "*gajah dibelangkoni, iso kojah ra iso negelakoni*". Jika pengkaderan sebatas mencerdaskan tanpa disertai beban moral untuk mencerdaskan diri sendiri, apa bedanya dengan orang yang merasa akan dijamin masuk surga setelah mengingatkan orantg lain, tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya?

Spiral *Pseudo* Heroisme

Lebih jauh, jika proyek percontohan tidak dijadikan model pengkaderan, maka spiral *pseudo* heroisme tadi tidak akan pernah putus. Misal, jika ada pengurus yang menanyakan kepada kader "sudah baca buku apa hari ini?" Atau, "kamu harus paham apa itu kapitalisme, kamu harus baca buku!" Tetapi ternyata dirinya sendiri sebenarnya belum membacanya. Hal ini akan dijadikan percontohan kader untuk melakukan hal yang sama kepada generasi selanjutnya ketika dia kelak menjadi pengurus. Spiral ini akan berulang. Orang dalam spiral ini tidak akan merasa terbebani secara moral karena memang tidak menganggap pengkaderan sebagai sebuah proses spiritual, hanya proses keorganisasian an sich. Jika ada pengkaderan semacam itu pastilah mempertahankan jumlah tanpa meningkatkan kualitas kader akan menjadi lumrah.

PMII adalah organisasi pengkaderan. Jantungnya adalah pengkaderan. Setiap pengurus memiliki beban spiritual untuk menjadi proyek percontohan. Jika begitu sudah wajar jika dilontarkan pertanyaan, "lantas dengan luas dan rumitnya bidang yang harus diajarkan di PMII, apakah setiap orang diharuskan bisa menggarap semua?" Jawabannya tentu tidak. Sekali lagi, keterbatasan semacam ini biasanya disiasati dengan sistem pengkaderan berlapis. Atau yang akhir-akhir ini lebih dikenal sebagai kon-

sep mentoring. Mentor sendiri akan dibentuk di setiap tingkatan; mentor Rayon, Komisariat sampai ke tingkatan Cabang. Strata mentor inilah yang memungkinkan seorang kader bisa dikader beberapa mentor, begitu pun sebaliknya. Istilah lainnya adalah pengkaderan silang. Syaratnya tidak mudah, secara teknis harus diadakan semacam loka karya untuk memastikan infrastruktur dan suprastruktur yang memungkinkan proses ini terjadi.

Jika sahabat-sahabati membaca tulisan ini dengan sungguh-sungguh dan belum menemukan sesuatu yang baru atau bahkan belum menjawab kerisauan atas pertanyaan seputar proses pengkaderan, hal tersebut tentu wajar. *Pertama*, karena mana mungkin begitu kompleksnya permasalahan bisa dijawab satu tulisan sederhana. *Kedua*, keterbatasan ruang gerak penulis juga memungkinkan perbedaan-perbedaan umum dalam memandang proses pengkaderan ini. Terlepas dari itu, hal yang paling ingin disampaikan penulis dalam tulisan ini adalah pesan pertanyaan reflektif. Apakah selama ini kita sudah menggunakan suatu landasan filosofis dalam pola pengkaderan kita? Apakah nurani kita tidak terusik jika belum ada jaminan bahwa generasi selanjutnya belum tentu lebih baik dibanding generasi kita saat ini? Maka, ingatlah sahabat-sahabati, pengkaderan adalah tentang menyambung harapan dan menebar optimisme bangsa! Ceritanya akan beda jika kalian ber-PMII hanya karena ingin menambah teman. Kalau sudah seperti itu, saya tidak bisa berkomentar!

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan
Pengkaderan PC. PMII Kota Semarang
2016-2017)

PENYERAGAMAN **PENGKADERAN PMII**

Tugas berat Pengkaderan di PMII Cabang Kota Semarang adalah menjamin di setiap Rayon punya seorang Fasilitator yang mampu melaksanakan MAPABA sesuai yang tertera di AD/ART.

Pendidikan adalah suatu upaya pembentukan atau malah pembangunan suatu identitas kultural (ideologi). Pendidikan yang saya definisikan tentu penjelasan tentang pendidikan dari lapisan kulit terluarnya, tetapi sekurang-kurangnya pasti kalau didiskusikan lebih mendalam pasti itulah jawabanya. Bagaimana mata pelajaran Pancasila diajarkan, adalah tentang upaya penyeragaman tafsir tentang Pancasila yang menyimpan peluang keragaman tafsir. Maka pendidikan Pancasila adalah upaya untuk membentuk identitas kultural (ideologi) Pancasila kepada semua peserta didik agar punya tafsir yang serupa terkait pemahaman Pancasila, kalau pun melenceng tentu masih pada batas yang bisa dimaklumi.

Dengan pembatasan definisi semacam itu maka saya ingin menegaskan bahwa penyeragaman bukanlah selalu tentang keburukan yang selalu disandingkan sebagai konsekuensi suatu sistem otoriter. Sisi lainya tentu agar ada kesepemahaman umum, ada haluan umum, yang memungkinkan sesuatu bisa digerakkan secara rapi dalam suatu tingkatan yang hirarkis dengan struktur berlapis-lapis. Penyeragaman ini juga bisa digunakan untuk menjadi alas managemen suatu sistem tatatanan nilai kultural yang ingin dibentuk. Misalnya, karakter Pancasila yang harus dimiliki oleh semua warga Indonesia, maka usaha pembangunan nilai tersebut haruslah melalui suatu sistem pendidikan yang punya haluan umum.

Pengkaderan di PMII pun sama. Sebenarnya pola penyeragaman ini sudah dibentuk agar menjaga kualitas nilai kultural kader PMII. Sistem pendidikan penyeragaman tersebut malah sudah mulai semakin rapi dengan disusunnya apa saja yang menjadi materi wajib dan pilihan di setiap jenjang pengkaderannya, juga dengan ketetapan jarak waktu antar sistem pengkaderannya. Artinya, ada suatu karakter umum yang ingin dihasilkan PMII untuk menjadi karakter umum kader-kadernya. Maka PMII sebagai organisasi, melahirkan tujuannya yang hanya bisa dicapai jika ada penyeragaman pendidikan (pengkaderan). Pengkaderan yang seragam akan menghasilkan suatu masyarakat yang punya karakter sama terhadap alas yang dijadikan penopang.

Tetapi bukan hanya dari sekarang saja, dari dulu sesuatu yang kualitatif memang selalu *debatable*. Bagaimana kader PMII di masing-masing Komisariat atau Rayon diukur dan dievaluasi kualitas karakternya? Oleh siapa? Padahal tujuan PMII akan dicapai saat sistem pengkaderannya bisa berjalan rapi dan dievaluasi secara periodik.

Fasilitator dan Instruktur

Menjawab pertanyaan tersebutlah PMII Cabang Kota Semarang ingin membentuk suatu sistem penguatan pengkaderan melalui Fasilitator dan Instruktur. Mari kita sederhanakan, Fasilitator adalah orang yang bertugas melaksanakan sistem pengkaderan di tingkat Rayon dan Komisariat (MAPABA dan PKD). Fasilitator yang ingin dibentuk maka sosok yang mampu melaksanakan sistem pengkaderan sesuai AD/ART yang sudah tersedia. Secara teknis Fasilitator haruslah mampu menerjemahkan dan melaksanakan pedoman pengkaderan dengan akurat. Sementara Instruktur adalah kader PMII tingkat Cabang yang memastikan kualitas nilai suatu tahapan pengkaderan secara komprehensif dan lebih bersifat kualitatif.

Pada tahapan lebih lanjut, Fasilitator akan menjadi suatu struktur yang berada pada sistem pengkaderan PMII yang akan mampu melakuakan diseminasi materi yang telah disediakan dalam sistem. Sehingga setiap jenjang pengkaderan yang dilalui anggota dan kader PMII bisa terserap secara mendalam dan efisien. Sedangkan Instruktur berkewajiban me-

mastikan Fasilitator punya kapasitas untuk melakukan tugasnya dengan benar. Dengan konsep Fasilitator dan Instruktur ini, maka penyeragaman karakter umum yang ingin dihasilkan PMII Cabang Kota Semarang diharapkan bisa terbentuk secara utuh.

Jika karakter PMII sudah terbentuk tentu pencapaian tujuan organisasi menjadi hal otomatis akan didapatkan. Maka, tugas berat Pengkaderan di PMII Cabang Kota Semarang adalah menjamin di setiap Rayon punya seorang Fasilitator yang mampu melaksanakan MAPABA sesuai yang tertera di AD/ART, pun demikian di tingkat Komisariat untuk menggelar PKD. Dengan demikian maka suatu sistem yang ingin diseragamkan sebagai karakter umum PMII tentu akan sangat membantu memobilisasi visi gerakan.

Penulis: ***Ahmad Muqsith***

(Departemen Pendidikan dan Pengkaderan PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)

TIGA PERTANYAAN

kelak di hari akhir, manusia akan ditanya berkenaan dengan setiap sikap dan tindakannya. Ada tiga pertaanyaan.

Sang Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali dalam kitab *Kimia al-Sa'adah* mengatakan, bahwa kelak di hari akhir, manusia akan ditanya berkenaan dengan setiap sikap dan tindakannya. Ada tiga pertaanyaan: "Kenapa Engkau Melakukannya?", "Bagaimana Kamu Melakukannya?" dan "Apa tujuanmu malakukannya?"

Menurut Imam al-Ghazali, alasan pertanyaan pertama ditanyakan adalah karena sudah semestinya setiap tindakan manusia didasari atau didorong oleh semangat Ilahiah, bukan dorongan setan, atau badaniah belaka. Jika orang tersebut lolos, dalam arti mampu menjawab dengan baik, maka akan dihadapkan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua berperan menguji terkait bagaimana pekerjaan itu dilakukan, apakah dengan bijaksana, atau malah dengan lalai dan ceroboh. Sedangkan pertanyaan ketiga, ditanyakan untuk menguji apakah tindakan tersebut dilakukan hanya demi mencari ridha Allah, atau malah hanya untuk mendapatkan pujian manusia.

Menurut Imam al-Ghazali, orang-orang yang memahami betul arti dari pertanyaan-pertanyaan di atas, akan sangat awas terhadap keadaan hatinya dan bagaimana ia berpikir, yang menjadi landasan ia bertindak.

Lalu, kenapa penulis dalam judul tulisan ini, mengakhiri dengan kalimat "Pengurus PMII yang Baru Dilantik Wajib Tahu"?

Sebenarnya, tiga pertanyaan di atas, walaupun akan ditanyakan di masa depan, namun seakan-akan diproyeksikan untuk sekarang. Jika seseorang, dalam melakukan setiap tindakannya dilandasi dengan tiga pertanyaan di atas, maka tindakannya pun akan berpotensi aman kelak di hari pertanggungjawaban.

Bagi Pengurus PMII yang baru dilantik, mereka cepat atau lambat akan merancang kegiatan organisasi dalam satu periode kepengurusan. Kegiatan tersebut nantinya juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka, mengetahui tiga pertanyaan di atas, menjadi relevan bagi Pengurus yang baru dilantik.

Jika Pengurus PMII yang baru dilantik, selalu mengandaikan tiga pertanyaan tersebut sebelum melakukan kegiatan atau bersikap, tentu perjalanan satu kepengurusan tidak akan keluar dari rel organisasi. Contohnya, PMII yang semula didirikan sebagai pergerakan tidak akan menjadi sekedar 'kerumunan'.

Pertanyaan pertama, menanyakan tentang alasan kenapa melakukan kegiatan. Pertanyaan ini jika direnungkan, maka akan menuntut pengurus dalam merumuskan kegiatan, tidak asal-asalan. Pengurus dengan sekuat daya, akan mencoba menganalisis berkenaan relevan atau tidaknya sebuah kegiatan. Dan nantinya ketika ditanya tidak akan muncul jawaban: "kegiatan ini dulu dilakukan pengurus sebelumnya", namun akan menjawab: "setelah kami analisis, kegiatan ini masih relevan, dengan alasan...."

Setelah selesai merumuskan kegiatan apa yang relevan dilaksanakan, menjadi penting bagi pengurus untuk menjawab pertanyaan berkenaan pelaksanaan atau realisasinya. Pengurus akan menganalisis, bagaimana cara melaksanakan kegiatan secara baik, sesuai dengan yang dirumuskan di awal dan sesuai dengan visi-misi organisasi. Pengurus juga akan dituntut untuk menganalisis atau memetakan sumber daya yang dimiliki dan yang berpotensi dimiliki, atau diajak kerja sama.

Selanjutnya, pengurus akan dihadapkan terkait tujuan atau orientasi dari kegiatan tersebut. Pertanyaan ini akan menuntut pengurus untuk

tidak disorientasi. Tidak keluar dari rel organisasi, yaitu kaderisasi yang bersifat gerakan kolektif dalam bingkai keislaman dan ke-Indonesia-an.

Dengan mengandaikan tiga pertanyaan di atas, sebelum melakukan kegiatan, berpotensi akan menghindarkan pengurus dari ketidakmampuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan (baca: membisu atau mementi belas kasihan) kelak di hari Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) di akhir kepengurusan. Semoga begitu.

Penulis: ***Zaimuddin Ahya***

(Departemen Pers dan Teknologi Informasi PC. PMII Kota Semarang 2016-2017)